

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI DALAM MENCIPTAKAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG KUAT BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

Ikama Dewi Setia Triana, Iskatriah

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

e-mail: trianadewi007@gmail.com , katriiskatrinah@gmail.com

ABSTRAK

Proses degradasi nilai dan moral tersebut bukanlah proses yang singkat hingga memunculkan karakter manusia Indonesia yang cenderung memiliki nilai-nilai positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika pembudayaan nilai-nilai menyimpang tersebut pada dasarnya juga adalah hasil proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan generasi masyarakat yang kurang berkarakter Pancasila. Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominasi atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.

Kata Kunci : Pancasila, karakter, nilai, berbangsa dan bernegara.

ABSTRACT

The process of degradation of values and morals is not a short process so that the character of Indonesian people tends to have materialistic positivistic values. For example, corrupt behavior is even said to have been entrenched in Indonesia. If the culture of these deviant values is basically the result of the educational process (because culture cannot be separated from education), then it can also be said that there is something wrong with the education process in this country for a long time, giving birth to a generation of people who lack the Pancasila character. . Education in Indonesia is deemed to be less based on Pancasila character education, but rather to dominate or boast an education that is not obscure on the excellence of thinking cognitive logic alone.

Keywords: Pancasila, character, values, nation and state.

PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia dewasa ini yang makin kuat dipengaruhi oleh proses globalisasi membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Di samping harus diakui bahwa proses globalisasi membawa dampak positif pada terutama aspek pertumbuhan ekonomi, dampak negatif juga tidak dapat dihindarkan. Salah satu dampak negatif yang makin kuat menggejala dewasa ini adalah makin melemahnya karakter dan kepribadian kehidupan berbangsa Indonesia. Pemerintah RI (2010: 16-19) bahkan menengarai ada enam masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam rangka membangun karakter bangsa, yaitu sebagai berikut. (1) Masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami disorientasi dan belum menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Ada keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (4) Memudarnya kesadaran

terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Adanya ancaman disintegrasi bangsa. Dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Dari enam masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, episentrum permasalahan tersebut sesungguhnya bersumber dari disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa oleh seluruh masyarakat, bangsa, dan warga negara Indonesia. Implikasinya, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia tidak teraplikasi atau terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kondisi ini tidak saja terjadi pada masyarakat tingkat akar rumput, tetapi bahkan lebih memprihatinkan terjadi pula di tingkat elit masyarakat bahkan terjadi di kalangan pejabat negara yang semestinya menjadi contoh atau teladan dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Meningkatnya angka kriminalitas setiap tahunnya, konflik dan perpecahan yang makin tajam terjadi di masyarakat, kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi materialisme dan sekulerisme, premanisme yang makin brutal, kebebasan seks yang makin vulgar, tindakan *money politic* dalam pesta demokrasi yang makin tebal muka, hingga korupsi uang negara oleh para penguasa negara menjadi indikator kemerosotan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi seperti ini. Praktik penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang terjadi dalam pengalaman sejarah perkembangan NKRI, belum tersosialisasikannya dengan baik eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, gamangnya kebijakan pemerintah dalam proses pemasyarakatan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila, dan karena pengaruh ideologi besar dunia lainnya di era globalisasi ini, menjadi virus-virus utama yang makin melemahkan upaya-upaya pemahaman, penghayatan dan peyakinan, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Karena itu, upaya pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, bersamaan dan menjadi kesatuan dengan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa (Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), menjadi *conditio sine qua non* bagi bangsa Indonesia. Tetapi pengembangan dan pelaksanaan upaya ini tidaklah mudah. Upaya serupa sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan orde baru dengan pelaksanaan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai bentuk pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Manggala BP7. Tetapi, upaya ini ternyata menunjukkan hasil yang nihil bahkan dilematis. Pengalaman ini menjadi kerikil tajam untuk meneruskan pelaksanaannya. Dibutuhkan idealisme yang kuat serta usaha yang inovatif serta kreatif sesuai dengan realita kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila ini.

Membangun peradaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah *conditio sine qua non* bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan jika individu-individu manusia Indonesia sebagai pendukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur dalam rangka membangun peradaban bangsa. Karakter bangsa yang dimaksud adalah yang telah membentuk kepribadian Pancasila sebagaimana diakui bahwa Pancasila adalah jiwa dan

kepribadian bangsa Indonesia. Tidak kalah pentingnya, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, budaya nasional tidaklah lekang dari pengaruh budaya global, terutama karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai modern dan globalnya. Beberapa isme-isme besar pengaruh global yang turut mempengaruhi kehidupan budaya nasional dan lokal masyarakat Indonesia antara lain adalah: rasionalisme, neoliberalisme, ideologi pasar (ideologi komoditi), hedonisme, konsumerisme, materialisme, individualisme, kapitalisme, sekulerisme, penghargaan yang tinggi terhadap HAM, demokrasi, dan sejenisnya (Atmadja, 2008).

Pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional dengan interaksi budaya lokal dan global tersebut telah memberikan kesadaran kepada pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang bersifat monopluralistik. Dengan sebuah adagium, kepribadian seperti itu dapat digambarkan dalam karakter kehidupan yang memiliki kemampuan *think globally, act locally, commit nationally, and respect multiculturally* (Sukadi, 2006). Karakter kemampuan atau kompetensi ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan harus diintegrasikan dan disenergikan agar dapat menjadi satu kekuatan modal sosial, budaya, simbolik, dan kuasa bagi pembangunan bangsa dengan karakter yang dinamis.

Integrasi dan sinergi kemampuan dan kepribadian tersebut telah mampu membentuk dan menjadi karakter yang memberikan identitas nasional kepada manusia Indonesia yang bisa dijabarkan dalam penghargaan nilai-nilai. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian nasional tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan dan toleransi, dan menghargai keberagaman. Karakter manusia dan masyarakat Indonesia juga menonjolkan: persaudaraan umat manusia, cinta damai, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai kecerdasan, kreativitas dan inovasi, motivasi berprestasi, etos kerja, mandiri dan kewirausahaan, disiplin, kompetisi secara fair, dan bekerjasama untuk perdamaian. Sebagai satu komunitas bangsa, masyarakat Indonesia juga mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa gotong royong, menunjukkan semangat patriotisme dan kepahlawanan, menjunjung tinggi nasionalisme dan mengabdikan diri untuk *dharma negara*, beretika untuk menghargai lingkungan, dan mengembangkan budaya malu. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain adalah: etika dialog, komunikatif, jujur, terbuka, demokratis, setia dan patuh kepada pemimpin, serta menghargai dan mematuhi norma-norma dan hukum. Tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja, mengakui dan menghormati keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan orientasi masa lalu masa kini dan masa depan (bandingkan dengan Pemerintah Republik Indonesia; 2010:20-22).

Sayangnya, kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia oleh banyak pihak diakui telah menunjukkan adanya degradasi atau demoralisasi dalam pembentukan karakter dan kepribadian Pancasila tersebut. Degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai inti atau *core values* dari pembentukan karakter bangsa tersebut tidak saja terjadi di kalangan masyarakat awam di tingkat akar rumput, tetapi juga sudah merambah ke kepribadian para profesional, tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para

pemimpin bangsa dan negara. Tidak mengherankan, karena itu, jika banyak penilaian masyarakat internasional yang memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara terkorup dan dengan birokrasi pemerintahan paling buruk di dunia (Baca Balipost). Dua penilaian ini saja sudah mencerminkan bagaimana kesatuan nilai-nilai Pancasila telah terabaikan dan termarginalkan dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Menurut pandangan Pemerintah Republik Indonesia (2010:16-19), dewasa ini ada enam permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa, yaitu: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. Sejalan dengan enam permasalahan tersebut telah muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini muncul dalam berbagai kasus, seperti: kasus narkoba yang makin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa yang makin menghiiasi berita TV, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pronografi dan porno aksi yang makin vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik, hubungan seks bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda siswa dan mahasiswa, tindakan KKN di mana-mana, serta kasus mafia hukum, peradilan, dan mafia pajak. Tidak kalah hebohnya adalah munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat Indonesia sendiri, kasus *money politics* dalam pilkada dan pemilu legislatif, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang makin tajam dan tidak fair, pameran kekayaan yang makin tajam oleh kelompok kaya terhadap kelompok miskin, kasus penggusuran kelompok miskin di kota-kota besar, dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat. Kasus-kasus tersebut adalah sedikit contoh kecil dari gunung es bagaimana degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dewasa ini.

Proses degradasi nilai dan moral tersebut bukanlah proses yang singkat hingga memunculkan karakter manusia Indonesia yang cenderung memiliki nilai-nilai positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika pembudayaan nilai-nilai menyimpang tersebut pada dasarnya juga adalah hasil proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan generasi masyarakat yang kurang berkarakter Pancasila. Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominasi atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka. Rektor IAIN Jakarta pernah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang membangun sifat-sifat: berterima kasih dan memaafkan (*orphan*), menjadi diri sendiri (*wanderer*), memiliki mental juara (*warrior*), membantu orang lain dengan ikhlas (*altruist*), bahagia dan damai (*innocent*), dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin (*magician*). Menurut Mahatma Gandhi pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: “*to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to*

society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat) (Williams dan Megawangi, 2010). Jelaslah bahwa pendidikan karakter bangsa itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.

Lembaga pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi, juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa berbasis Pancasila dalam rangka memajukan peradaban bangsa. Sesuai dengan visi Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) IV (2003-2010), misalnya, maka pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dasar untuk mencapai visi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa daya saing bangsa hanya dapat dicapai dalam bingkai karakter bangsa dan peradaban yang kuat. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan dan titik kulminasi proses pendidikan dalam jenjang pendidikan formal jelas memiliki peran dan tanggung jawab dalam memantapkan pembinaan karakter bangsa yang telah dibangun dan dikembangkan sejak pendidikan dasar. Untuk itu pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan yang kuat, memahami bagaimana menjadi warganegara yang baik dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Brodjonegoro, 2003).

Pembahasan

Pendidikan Karakter

Karakter, sebagaimana didefinisikan oleh Simon Philips (2008), adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A (2007) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ”ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan”. Sementara itu, Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanasifestasikan karakter buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanasifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan ‘*personality*’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Akhirnya, Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Dari empat definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya.

Karakter dengan definisi seperti di atas, menurut Foerster memiliki empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi

baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat ciri karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. "Orang-orang modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior." Karakter inilah yang menentukan performa seorang pribadi dalam segala tindakannya.

Tetapi, karakter bukanlah masalah kepribadian individualitas saja. Dalam pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominasi bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai "kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa". Sejalan dengan pengertian ini, karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 7). Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektif-sistemik masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Semua upaya ini adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar Pancasila.

Pancasila Sebagai Ilmu Pengetahuan

Pancasila dapat menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam pengembangan sistem pengetahuan. Di sini Pancasila memiliki pandangan yang utuh tentang sistem pengetahuan. Secara ontologis Pancasila yang mengakui dasar hakikat manusia meyakini bahwa sumber pengetahuan itu tidaklah semata-mata objek pengetahuan empirik atau pengetahuan rasional saja. Menurut Pancasila, manusia sebagai pembangun dan pengembang pengetahuan memiliki dimensi-dimensi pengetahuan secara utuh meliputi: pengetahuan fisik dunia empirik, pengetahuan emosional, pengetahuan intuitif, pengetahuan intelektual yang rasional, pengetahuan sosial, pengetahuan moral, dan pengetahuan spiritual (Kaelan, 2003). Dalam bahasa yang lebih operasional, sistem pengetahuan seperti ini diakui adalah sebagai hasil dari olah pikir, olah rasa dan karsa, olah hati, olah iman, dan olah raga. Karena itu, salahlah jika dalam sistem pendidikan nasional hanya

dibangun pengetahuan intelektual dan empirik semata. Manusia Indonesia menurut pandangan Pancasila adalah makhluk berpikir yang berdimensi ganda, namun bersifat monopluralistik.

Secara epistemologis, karena itu, Pancasila dalam membangun sistem pengetahuan yang utuh tersebut tidaklah hanya menggunakan kriteria kebenaran rasional dan empirik yang bersifat sekuler melalui penggunaan pendekatan atau metode ilmiah semata. Karena keseimbangan hakikat manusia sebagai makhluk monopluralistik, maka manusia Indonesia membangun sistem pengetahuannya yang utuh bisa juga melalui pendekatan atau proses-proses imajinatif dan intuitif yang menekankan nilai rasa, pendekatan konsensus yang menekankan nilai-nilai sosial, pendekatan reflektif yang menekankan nilai keluhuran budi atau moral, dan pendekatan kontemplatif untuk mendapatkan kebenaran ilham yang menekankan nilai-nilai transenden yang bersifat spiritual (Kaelan, 2006). Inilah hakikat manusia Indonesia seutuhnya dari aspek fisik dan kejiwaannya. Dengan kerangka filosofi pengetahuan seperti ini, jelaslah bahwa manusia Indonesia tidaklah dipandang hanya dalam hakikatnya sebagai makhluk jasmaniah dan makhluk berpikir saja yang perilakunya hanya mengikuti hukum rasionalitas dan hukum materialistik semata. Manusia Indonesia juga adalah makhluk yang memiliki rasa, intuisi, imajinasi, karsa, memiliki budi, memiliki cita-cita, makhluk bermasyarakat, dan bahkan makhluk spiritual. Dengan begitu Pancasila mengakui hakikat humanisme-sosio-kultural-religius.

Nilai-nilai, selanjutnya, yang mendasari pengembangan sistem pengetahuan menurut pandangan Pancasila merupakan pengalaman manusia Indonesia dalam mewujudkan dan mengimplementasikan hakikat kemanusiaannya yang utuh sebagai makhluk monopluralistik, baik dari dimensi makhluk religius, makhluk sosial, makhluk individu, makhluk jasmani, dan sebagai makhluk berpikir yang berbudaya. Pengalaman mewujudkan hakikat kemanusiaan yang utuh ini memberikan pengalaman nilai-nilai yang dianggap berharga dalam kehidupannya dan menjadi kriteria baginya dalam membuat keputusan kebijakan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara seimbang, serasi, selaras, dan harmonis. Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut ada yang bersifat fundamental seperti nilai-nilai fundamental Pancasila, ada pula yang bersifat nilai-nilai instrumental dan praksis. Sebagai insan atau makhluk religius, misalnya, manusia Indonesia mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan (*crada, bhakt, dan karma wacana yang baik*) kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan nilai-nilai toleransi, dan bahkan mengembangkan nilai-nilai *Tat Twam Asi*. Sebagai makhluk sosial, misalnya, manusia Indonesia berhasil mengembangkan nilai-nilai kelompok dan organisasi; nilai-nilai hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; nilai-nilai kerjasama secara gotong royong; kepekaan sosial dan nilai-nilai altruistik; nilai-nilai patriotisme dan kepahlawanan; nilai-nilai nasionalisme; serta nilai-nilai kepemimpinan. Sebagai makhluk pribadi atau individu, selanjutnya, manusia Indonesia juga secara harmonis mengembangkan nilai-nilai kemandirian, tanggungjawab, etos kerja dan motivasi berprestasi, disiplin, keuletan, kompetisi, kejujuran, dan sejenisnya. Sebagai makhluk jasmani, manusia Indonesia juga tidak melupakan untuk mengembangkan nilai-nilai kecantikan atau keindahan, kenikmatan, keamanan, kesehatan dan kebugaran, dan sejenisnya. Akhirnya, sebagai makhluk berpikir yang berbudi, manusia Indonesia juga mengembangkan nilai-nilai kecerdasan dan atau keilmuan, nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan moral, kreativitas, gemar berinovasi, dan sebagainya.

Sistem pengetahuan dan nilai-nilai sebagaimana dijelaskan tersebut tidaklah dibangun manusia Indonesia dalam ruang hampa. Dengan landasan filosofis Pancasila, sistem pengetahuan dan nilai-nilai tersebut diyakini dibangun dalam hubungan manusia: antara dirinya sebagai benda fisik jasmaniah, dengan dirinya sebagai individu, dengan Tuhannya, dengan masyarakatnya, dengan bangsa dan negaranya, dengan masyarakat globalnya, dan dengan lingkungan alam sekitar dan alam rayanya yang dipandanginya memiliki hubungan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan-hubungan manusia seperti itu dapat dipahami pula dari hubungan manusia Indonesia dengan dimensi ruang dan waktu serta aktivitasnya (Hasan, 2010). Sistem pengetahuan dan nilai-nilai itulah yang kemudian membuatnya menjalin hubungan yang seimbang, serasi, selaras, dan harmonis.

Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Berbangsa dan Bernegara

Pendidikan karakter bangsa tidak bisa dilepaskan dari program pembangunan karakter bangsa pada umumnya. Secara historis kita ketahui bahwa pembangunan karakter bangsa bahkan merupakan gagasan besar yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Sebabnya adalah sebagai bangsa yang dibangun dari masyarakat majemuk (keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan dengan nuansa nilai-nilai kedaerahan), Bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan dasar dan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai satu bangsa. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang besar yang berkesejahteraan, berkeadilan, dan berkemakmuran. Jelaslah bahwa pendidikan karakter sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari landasan kehidupan sosiobudaya masyarakat Indonesia.

Kini masyarakat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan pengaruh lingkungan strategis baik dari tingkatan lingkungan global, lingkungan nasional, maupun lingkungan kedaerahan (lokal). Lingkungan global telah memberikan pengaruh terutama melalui perkembangan ipteks dan kemajuan dunia transportasi, komunikasi, dan informasi. Tidak saja dampak negatif, masyarakat dan bangsa Indonesia juga telah menerima berbagai dampak positif di segala bidang ipoleksosbudhankam dalam kehidupan globalnya. Pengaruh-pengaruh ini tentu perlu dikelola secara cerdas oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda peserta didik pada khususnya agar tidak dihanyutkan oleh gelombang besar pengaruh globalisasi. Dalam hal ini kemampuan mengambil keputusan untuk memilah dan memilih nilai-nilai yang berguna bagi masyarakat serta mampu menumbuhkan kemandirian dan daya saing bangsa tentu menjadi *concern* utama program pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.

Lingkungan strategis kehidupan masyarakat di tingkat nasional juga perlu menjadi basis bagi pengembangan program pendidikan karakter. Di sini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Jika ini dapat menjadi SDM yang handal tentu akan memberikan sumbangan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Tetapi, sayangnya, kita masih banyak bermasalah dengan azas pemerataan dan keadilan karena faktor diskriminasi dalam membangun kualitas SDM yang besar jumlahnya tersebut.

Dalam bidang politik dan pemerintahan kita telah sepakat untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang demokratis. Beberapa keberhasilan telah dicapai. Sayangnya demokrasi cenderung lebih bersifat formal dan belum bersifat substansial melandasi seluruh praktik

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sanusi, 1998). Memajukan nilai-nilai kehidupan berdemokrasi yang lebih substansial, karena itu, tentu menjadi tantangan dalam pembangunan dan pendidikan karakter di Indonesia.

Masyarakat dan pemerintahan yang demokratis akan terwujud jika pelaksanaan hak-hak dan kewajiban setiap warga negara diatur secara seimbang dan harmonis dalam pelaksanaan sistem hukum nasional. Empat masalah penting di sini adalah belum seluruh produk hukum nasional mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, perilaku aparat penegak hukum yang cenderung diskriminatif, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, dan masih banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak azasi manusia (Atmoredjo, 2009; Zoelva, 2009). Ini juga adalah tantangan utama dalam pembangunan karakter berbangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang demokratis juga adalah masyarakat yang berkesejahteraan, berkemakmuran, serta berkeadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk ini perlu dibangun sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila. Di sini pertumbuhan ekonomi diharapkan sejalan dengan azas pemerataan dan keadilan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan, kemampuan daya saing dalam persaingan global, serta mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja. Sayangnya, karena pengaruh global, pengaruh sistem ekonomi neoliberal yang berorientasi pasar, mengembangkan perilaku konsumeristik, individualistik, materialistik, dan hedonistik tidak bisa dihindarkan (lihat Dwipayana, 2009). Semua ini juga adalah tantangan dalam pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.

Kehidupan masyarakat yang demokratis juga haruslah didukung oleh sistem kehidupan sosial budaya masyarakat yang kondusif dan substansial membangun nilai-nilai-nilai demokrasi. Untuk ini dibutuhkan aspek-aspek kecerdasan ganda, sikap keterbukaan, toleransi, menghargai perbedaan, bermusyawarah, kreatif, produktif, mandiri, bertanggung jawab, berani membela kebenaran dan keadilan, partisipatif, supremasi hukum dan keadilan, kepercayaan, kejujuran, serta menghargai persamaan kedudukan dan derajat kemanusiaan (Sanusi, 1998; Purwoko, 2009).

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk tidak bisa lepas dari pengaruh nuansa nilai-nilai kedaerahan (lokal). Sebabnya adalah bahwa masyarakat nusantara telah memiliki berbagai kearifan lokal yang selama ini juga telah memberikan kontribusi bagi pengembangan kekayaan kebudayaan nasional. Berbagai kearifan lokal yang sejalan dan memberikan kontribusi pada pembangunan kekayaan kebudayaan nasional perlu dipelihara dan terus ditumbuhkembangkan agar dapat menjadi modal sosial yang berguna bagi pembangunan bangsa dan umat manusia. Gejala penyakit sosial yang terjadi adalah makin melemahnya apresiasi generasi muda terhadap nilai-nilai dan produk kearifan lokal tersebut yang berujung pada lemahnya kompetensi generasi muda untuk menumbuhkembangkan produk-produk budaya lokal yang mampu menasional dan mengglobal. Ini adalah juga tantangan bagi pengembangan pendidikan karakter bangsa di Indonesia.

Kesimpulan

Pendidikan Karakter perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya. Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan. Dengan landasan ideologi Pancasila,

tujuan pendidikan karakter diarahkan tidaklah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Tujuan pendidikan karakter secara operasional dapat dirumuskan dalam penguasaan seperangkat kecakapan yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, komitmen, dan kompetensi yang mencerminkan karakter dari budaya manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dengan tujuan pendidikan karakter seperti inilah dikembangkan kompetensi lulusan pendidikan karakter di sekolah/ perguruan tinggi antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; kepekaan dan kepedulian sosial, bekerja sama dan gotong royong, serta bersatu dalam keberagaman; demokratis, bertanggung jawab, dan partisipatif; serta berorientasi hidup sehat, hemat, dan bersahaja.

Daftar Pustaka

- Adam, A. W. 2010. Empat Gelombang Pancasila. Dalam Surono (Ed). Nasionalisme dan Pembangunan Karakter bangsa. Hal.: 15 – 21. Yogyakarta: PSP Press.
- Ali, A. S. 2010. Nasionalisme, Kewargaan, dan Pancasila. Dalam Surono (Ed). Nasionalisme dan Pembangunan Karakter bangsa. Hal.: 3 – 10. Yogyakarta: PSP Press.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Asshiddiqie, J. *Pemasyarakatan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Didownload pada 25 Juli 2013.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Bung Karno, *Lahirnja Pantja Sila*.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hamengku Buwono X. Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Budaya. Makalah disampaikan pada Kongres Pancasila 2012 yang dilaksanakan di UGM Yogyakarta pada 31 Mei 2012.
- Kaelan, H. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.

- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Notonagoro, 1974, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain Induk*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Rindjin, K. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Singaraja: Undiksha Press.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum

- Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yamin. Strategi Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Konteks Konstitusionalisme. Didownload dari <http://kongrespancasila.com/strategi-pelembagaan-nilai-pancasila-dalam-konteks-konstitusionalisme.html> pada tanggal 25 Juli 2013.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40